**ANALISIS EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN
PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA
PONDOK KRESEK KECAMATAN TANJUNG MEDAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Rahmadani¹⁾, Sri Endang Kornita²⁾, Hendro Ekwarso²⁾

1) Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

2) Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

Email : rahmadany563@gmail.com

*The Effectiveness Of Village Funds In Village Economy Development And
Village Infrastructure Pondok Kresek Village, Tanjung Medan
District, Rokan Hilir regency*

ABSTRACT

This study aims to determine the allocation of village funds in economic development and village infrastructure in Pondok Kresek Village, Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency and to determine the effectiveness of village Funds in developing village economy and infrastructure in Pondok Kresek Village, Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency. The data analysis technique was carried out by qualitative descriptive analysis, where this study determined the effectiveness by using a Likert scale calculation and obtained through the average score of the answers to the research questionnaire. Based on the results of the study, it was found that the allocation of village funds in the development of the village economy and infrastructure in Pondok Kresek Village, Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency had been carried out in accordance with the provisions stipulated in the applicable regulations. , irrigation, cementization and drainage in Pondok Kresek Village, Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency. The development of the village economy and infrastructure in Pondok Kresek Village, Tanjung Medan District, Rokan Hilir Regency which is sourced from the utilization of village funds has been carried out effectively at 78.35, meaning that the utilization has been effective. although it has been carried out according to the provisions faced, the utilization of village funds is still experiencing limitations. As for the limitations in the village economy, this can be seen from the statements of respondents regarding the implementation of economic activities sourced from village funds. one of them is that the village has not been maximal in establishing BUMdes.

Keywords : Village Fund, Effectiveness, Development, Economy

PENDAHULUAN

Pengeluaran Pemerintah (government expenditure) adalah bagian dari kebijakan fiskal

(Sukirno, 2015), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian melalui penentuan tingkat penerimaan serta pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang

tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah ataupun regional. Kebijakan fiscal tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga, tingkat pengeluaran, ataupun kesempatan kerja dan mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut sesuai dengan Teori Keynes yang menyatakan jika peran pemerintah masih dibutuhkan jika kegiatan yang terjadi di pasar bebas secara penuh mengatur perekonomian, bukan saja perekonomian tidak selalu mencapai tingkat kerja penuh melainkan juga stabilitas dari aktivitas ekonomi tak akan terwujud (Sukirno, 2015).

Desa merupakan kesatuan wilayah otonom dengan diberlakukannya desentralisasi tidak lepas dari cita-cita demokrasi. Seharusnya langkah dalam mengimplemensikan desentralisasi desa dilakukan dengan terstruktur dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan harus mendapatkan fasilitas pendekatan partisipatif dan gagasan dari masyarakat terakomodir dalam sebuah konsep dan model desentralisasi desa (Siburian, 2014).

Peranan desa dalam sistem pemerintahan yang dijalankan saat ini cukup strategis yaitu membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, kemudian juga dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud nyata pemerintah daerah dalam mendukung jalannya otonomi daerah di wilayahnya. Pembagiannya berdasarkan dengan banyaknya penduduk, seberapa besar wilayahnya, fasilitas yang tersedia

dan kemudian dalam mengakses desanya. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan sebagai bentuk peningkatan (Siburian, 2014).

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah, mempunyai kewenangan untuk mengatur serta mengurus urusan masyarakat setempat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia. Penerapan otonomi desa akan menjadi sebuah kekuatan bagi desa dalam mengurus, mengatur dan menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, yang mana desa mempunyai kewenangan dalam mengurus pemerintahan desa.

Tujuan dari penggunaan dana desa untuk pembangunan desa adalah supaya kesejahteraan masyarakat desa dapat meningkat, kualitas hidup masyarakat desa meningkat dan mencegah kemiskinan. Kemudian tujuan dari pemberdayaan masyarakat desa adalah supaya kemampuan masyarakat dalam mengembangkan wirausaha semakin meningkat dan untuk memperluas area ekonomi masyarakat desa (Sari, 2017).

Jalan, jembatan dan berbagai sarana seperti telekomunikasi, listrik, irigasi dan transportasi merupakan infrastruktur fisik yang memicu perkembangan pembangunan di segala lini dalam sebuah daerah. Infrastruktur yang tersedia merupakan indikator dasar dalam melihat tingkat kesejahteraan sebuah daerah (Kodoatie, 2003).

Sesuai dengan pernyataan di atas, maka percepatan pembangunan ke depannya akan sangat penting untuk diutamakan. Hal tersebut

karena berbagai infrastruktur seperti jalan merupakan sarana pembuka dari terisolirnya sebuah daerah dari dunia luar, harapannya dengan tersedianya jalan tersebut akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala bidang (Kodoatie, 2003).

Sesuai dengan Undang-Undang Desa yaitu UU No. 6 tahun 2014 dijelaskan jika dana desa adalah dana yang dialokasikan dalam APBN dan diberikan kepada desa yang akan digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. selain itu, salah satu tujuan dari kebijakan dana desa ini adalah untuk memajukan perekonomian desa dan pemerataan pembangunan antar desa. sehingga dana desa diharapkan dapat menjadi pendorong pembangunan perekonomian desa dengan beragam aktivitas pembangunan dan pemberdayaan yang dalam meningkatkan produktivitas masyarakat desa. selain itu, ketersediaan infrastruktur desa sehingga adanya pemerataan pembangunan antar daerah perdesaan.

Provinsi Riau merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, meskipun pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (2020) justru menunjukkan kondisi yang kurang membahagiakan, akan tetapi di Riau masih terdapat banyak potensi yang dapat digali di masing – masing daerahnya. Sehingga kucuran dana desa diharapkan mampu menggali potensi dari elemen daerah terendah yaitu perdesaan.

Provinsi Riau terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota, yang mana yang memperoleh dana desa adalah daerah dengan administrative dikatakan desa, yaitu tersebar di 10 Kabupaten di Provinsi Riau yang mana dana desa akan disalurkan kemasing – masing desa di Kabupaten Tersebut.

Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat jumlah dana desa yang disalurkan kepada Kabupaten di Provinsi Riau beserta jumlah desa yang terdapat di masing – masing kabupaten tersebut :

Tabel 1
Jumlah Dana Desa yang di Salurkan dan Banyak Desa di 10 Kabupaten di Provinsi Riau Tahun 2019

No	Kabupaten	JumlahDesa	Dana Desa (Rp)
1	Bengkalis	155	131.071.696
2	Indragiri Hilir	236	168.394.033
3	Indragiri Hulu	194	160.181.885
4	Kampar	245	209.669.588
5	Kepulauan Meranti	101	96.400.996
6	Kuantan Singingi	229	172.266.776
7	Pelalawan	118	104.309.775
8	Rokan Hilir	159	143.289.390
9	Rokan Hulu	153	139.861.061
10	Siak	131	111.240.674

Sumber: *Djpk Depkeu, 2020*

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat jumlah desa dan jumlah dana desa di masing – masing kabupaten di Provinsi Riau. Dimana terdapat 5 kabupaten yang memiliki jumlah desa dan dana desa tertinggi, salah satu kabupaten yang masuk dalam 5 daerah tertinggi memiliki aliran dana desa yaitu Kabupaten Rokan Hilir.

Kabupaten Rokan Hilir adalah salah satu kabupaten di Riau pada tahun 2019 memiliki 159 desa dan telah menerima dana desa sebanyak Rp143.289.390 yang tersebar di 15 kecamatan.

Salah satu desa yang menjadi salah satu desa penerima dana desa di Kabupaten Rokan Hilir yang terletak di Kecamatan Tanjung Medan yaitu Desa Pondok Kresek, dimana dana desa yang disalurkan tentunya dapat menunjang peningkatan perekonomian desa selain itu juga dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Berikut ini dapat dilihat perkembangan dana desa dan jumlah penduduk di Desa Pondok Kresek Tahun 2015 – 2019 :

Tabel 2
Perkembangan Dana Desa dan Jumlah Penduduk di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Tahun 2015 – 2019

No	Tahun	Dana Desa (Rp)	Penduduk (Jiwa)
1	2015	296.808.607	3.527
2	2016	532.677.607	2.820
3	2017	843.360.000	3.195
4	2018	755.128.000	3.607
5	2019	890.997.000	3.756

Sumber : Laporan Pemerintahan Desa Pondok Kresek, 2020

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat perkembangan dana desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan tahun 2015 – 2019, dimana pada tahun 2015 dana desa diterima Desa Pondok Kresek sebanyak Rp296.808.607 meningkat di tahun 2016 menjadi Rp532.677.607. peningkatan terus terjadi hingga tahun 2017, namun di tahun 2018 dana desa yang diterima

Desa Pondok Kresek mengalami penurunan menjadi Rp755.128.000, tetapi di tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi Rp890.997.000.

Namun, kondisi jumlah penduduk di Desa Pondok Kresek terus pada tahun 2015 hingga tahun 2019, dimana tahun 2016 jumlah penduduk mengalami penurunan dari tahun 2015 sebesar 3.527 jiwa menjadi 2.820 jiwa di tahun 2016, meskipun demikian di tahun 2017 mengalami peningkatan hingga tahun 2019. Tentunya penyaluran dana desa diharapkan dapat mendorong pembangunan perekonomian desa terutama perekonomian masyarakat di desa tersebut. Dana desa yang disalurkan tentunya diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur yang menjadi penunjang kegiatan pembangunan perekonomian.

Sebelum melakukan kegiatan pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa tentunya kegiatan tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan sehingga dari dana desa yang disalurkan ke masing – masing desa dapat dianggarkan dengan baik sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan efektif.

Desa Pondok Kresek merupakan salah satu desa penerima penyaluran dana desa yang melaksanakan pengalokasian dana desa tentunya mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tertuang kedalam undang undang dan peraturan pemerintah serta peraturan menteri sehingga pelaksanaan dapat dilakukan seefektif mungkin.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?
2. Bagaimana efektivitas Dana Desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir?

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.
2. Mengetahui efektivitas Dana Desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Di dalam KKBI (2013) dijelaskan jika desa adalah sebuah area yang ditempati oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (dipimpin oleh Kepala Desa) atau desa adalah sekumpulan rumah diluar kota yang menjadi sebuah kesatuan. Menurut definisi umum, desa ialah suatu aglomerasi permukaan di wilayah pedesaan (hardjanto, 2007). Pengertian desa di Indonesia yaitu pembagian area administrasi dibawah kecamatan, yang di pimpin oleh Kepala Desa.

Pengertian desa juga tertuang dalam Permendagri No. 114 tahun 2014 Bab 1 (Pasal 1, ayat 1)

dijelaskan jika desa merupakan adat ataupun yang dinamakan dengan istilah lain, kemudian desa merupakan sekumpulan masyarakat yang mempunyai batas wilayah yang diberikan kewenangan dalam mengatur dan menyelenggarakan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan kehendak masyarakat, hak asal usul ataupun hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Di dalam UU No 6 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa tentang desa, dijelaskan jika pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Indonesia. Kemudian di dalam UU No. 6 tahun 2014 mengenai Pemerintahan Desa tentang Desa dijelaskan jika pemerintahan desa merupakan kepala desa ataupun disebutkan dengan istilah lainnya dibantu dengan perangkat desa selaku unsur penyelenggara pemerintahan desa.

B. Pembangunan Desa

Makna dari pembangunan desa yaitu partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Partisipasi bukan berarti hanya sebatas keikutsertaan dalam pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pihak ketiga (*outsiderstakeholder*) ataupun keikutsertaan dalam langkah mensukseskan program pembangunan yang masuk kedesaanya namun jauh lebih daripada itu. Dalam partisipasi yang paling penting yaitu bagaimanakah pembangunan desa itu dilakukan atas dasar inisiatif dan kehendak

masyarakatnya jadi dalam implementasinya dapat memakai kekuatan sumber daya serta wawasan yang dimiliki oleh masyarakat. Sehingga sekecil apapun potensi yang ada di desa dapat dikembangkan, sebab hal tersebut dapat menjadi sumber dari jalannya pembangunan.

C. Dana Desa

Di dalam peraturan menteri sudah dijelaskan jika prioritas dari Dana Desa yaitu untuk pembiayaan program dan aktivitas berskala lokal Desa bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Prinsip yang terdapat dalam pemberdayaan masyarakat desa yaitu; Keadilan, mengedepankan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa tanpa adanya diskriminatif, dan mengutamakan kepentingan yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berkaitan langsung dengan kepentingan mayoritas masyarakat desa dan karakteristik desa dengan mempertimbangkan letak geografis, keadaan sosiologi, antropologi, ekonomi dan ekologi desa yang khas dan perubahan ataupun perkembangan desa.

Sesuai dengan UU No. 6 tahun 2016 mengenai Desa, dijelaskan jika desa mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus kewenangannya berdasarkan kebutuhan setiap desa, sehingga hal tersebut berarti jika dana desa dapat dimanfaatkan untuk mendanai semua kewenangan desa berdasarkan kebutuhan dan prioritas dari dana desanya. Dana desa adalah dana yang berasal dari APBN yang diserahkan kepada desa yang dicairkan melalui APBD dan dimanfaatkan untuk pembiayaan

penyelenggaraan pemerintah, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Setiap tahunnya di dalam APBN pemerintah sudah mengalokasikan dana desa secara nasional yang berasal dari belanja pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara adil dan merata.

Di dalam PP No. 60 tahun 2014 pasal 5 mengenai Dana Desa dijelaskan jika sumber dari dana desa adalah dari APBN yang kemudian ditransferkan ke APBD yang diteruskan ke APBDes. Alokasi dari Dana desa masing-masing kabupaten atau kota sesuai dengan perkalian antara jumlah di masing-masing kabupaten atau kota dan rata-rata dana desa masing-masing provinsi. Rata-rata dana desa masing-masing provinsi menurut ayat (1) dialokasikan sesuai dengan jumlah desa yang terdapat pada satu provinsi terkait serta seberapa banyak jumlah penduduknya, seberapa besar luas wilayahnya, tingkat kemiskinan dan tingkat kesulitan geografisnya.

D. Teori Efektifitas

Gibson (2006) menyatakan bahwa efektifitas adalah menjelaskan jika efektifitas yaitu realisasi dari target yang sudah ditetapkan secara bersama. Pendapat dari Dunn (2003) menjelaskan jika efektifitas berhubungan dengan tingkat pencapaian hasil yang diharapkan. Pengukuran konsep efektifitas yaitu keberhasilan program, keberhasilan target, kepuasan akan program, dan tingkat pencapaian tujuan (Makmur, 2008).

Dari berbagai pendapat di atas, dapat disebutkan jika konsep efektifitas adalah sebuah konsep

yang sifatnya multidimensional, maksudnya adalah efektivitas mempunyai makna yang banyak tergantung dari tingkat keilmuan yang dimiliki meskipun tujuan akhirnya adalah pencapaian tujuan. Isitilah efektif banyak disamakan dengan efisien meskipun sebenarnya maknanya berbeda. Sebuah hal yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif. Zahid (2006) menjelaskan jika efektivitas adalah terfokus pada dampaknya, kemudian efisiensi diartikan dengan ketepatan ataupun kesesuaian pengerjaan sesuatu dengan tidak banyak membutuhkan waktu, tenaga dan biaya.

Dalam tahapan input, tingkat efisiensi kemampuan yang dimiliki menjadi penentu dari kemampuan seseorang. Tahapan proses dipengaruhi oleh kemampuan organisasi untuk menggunakan sumber daya yang dimilikinya, manajemen dan penggunaan teknologi supaya dapat menghasilkan sebuah nilai (Rohmi, 2008).

Dalam tahapan ini, tingkat keterampilan SDM dan reaksi organisasi terhadap perubahan lingkungan menjadi penentu tingkat produktivitas yang dihasilkan. Kemudian dalam tahapan output, layanan yang diberikan adalah hasil dari pemanfaatan teknologi dan keahlian SDM. Organisasi yang mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sangat efisien dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam memaksimalkan layanan yang diberikan dengan memuaskan kebutuhan konsumen (Rohmi, 2008).

E. Infrastruktur Desa

Secara spesifik infrastruktur diartikan dengan berbagai fasilitas

fisik yang dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dalam berbagai fungsi pemerintahan dalam persediaan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan berbagai layanan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Infrastruktur merujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, irigasi, drainase, bangunan, fasilitas umum lainnya yang dibutuhkan agar kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial ekonomi dapat terpenuhi. (Kodoatie, 2003)

Sistem infrastruktur adalah penunjang utama fungsi sistem sosial dan ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Sistem infrastruktur bisa diartikan dengan berbagai fasilitas ataupun struktur dasar peralatan, instalasi yang dibangun serta dibutuhkan supaya sistem sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan. Selain itu infrastruktur juga dapat dimaknai dengan fasilitas fisik yang dikembangkan ataupun dibutuhkan oleh masyarakat demi kepentingan pemerintahan dalam menyediakan air, listrik, pembuangan limbah, transportasi dan layanan publik yang dapat memfasilitasi tujuan ekonomi dan sosial. (Kodoatie, 2003).

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di salah satu desa di Kecamatan Tanjung Medan yaitu Desa Pondok Kresek dimana desa tersebut adalah salah satu desa yang menerima penyaluran dana desa aka tetapi di tahun 2018 terjadi penurunan aliran dana desa yang di terima. Waktu penelitian di lakukan pada Bulan April 2021. Populasi merupakan area penggeneralisasian

yang meliputi objek ataupun subjek yang memiliki kualitas dan atribut khusus yang ditentukan oleh peneliti supaya didalami dan selanjutnya disimpulkan. Adapun populasinya adalah Rumah tangga yang ada di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan yang berjumlah 877 keluarga.

Penentuan sampelnya menggunakan rumus slovin, sehingga jumlah dari sampelnya adalah 90 sampel dalam penelitian. sehingga akan ada 90 Orang yang akan menjadi responden, yang setiap desa akan mendapatkan jumlah responden yang meliputi Kepala desa, Pemerintah desa, Badan permusyawaratan rakyat dan masyarakat desa.

DEFENISI OPERASIONAL VARIABEL

Ruang lingkup penelitian ini mencakup efektivitas dana desa dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan infrastruktur di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hulu. Supaya pembahasannya mudah penelitian dibatasi hanya pada:

- 1) Efektivitas merupakan keberhasilan program; keberhasilan sasaran; kepuasan terhadap program; efisiensi; pencapaian tujuan. Adapun pengukuran untuk mengetahui bentuk efektifitas dilakukan berdasarkan persepsi masyarakat. Dengan satuan persentase (%)
- 2) Dana Desa merupakan bantuan berupa uang yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada masing – masing desa yang berasal dari APBD. Dengan satuan Rupiah (Rp).

- 3) Pemanfaatan Dana Desa adalah pengalokasian dana desa yang telah diterima desa yang selanjutnya telah disalurkan keberbagai kegiatan baik itu pembangunan desa maupun pemberdayaan desa. Satuan dalam bentuk unit .

METODE ANALISIS DATA

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu upaya yang dilaksanakan dengan cara bekerja menggunakan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang bisa dikelola, mensintesis, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang bisa disampaikan kepada individu yang lainnya (Umar, 2009)

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif yang langkahnya terdiri dari (Rohmi, 2018):

- a) Untuk efektivitas dana desa dalam pembangunan perekonomian dan pembangunan infrastruktur didapat dari hasil skoring kuesioner yang hasilnya nanti akan disajikan seperti pada tabel
- b) Menghitung jawaban responden ke dalam bentuk persentase :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Total Skor Hasil Penelitian}}{\text{Skor Kriteria (Skor Ideal)}} \times 100$$
- c) Menentukan predikat untuk efektivitas input Dana Desa. Apabila persentase jawaban responden kurang dari kriteria ideal yang ditentukan, maka input tidak efektif karena tidak tepat sasaran..

- d) Untuk variabel efektivitas proses Dana Desa juga diperoleh dari hasil skoring kuesioner yang nantinya akan disusun dalam tabel.
- e) Menghitung persentase efektivitas dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur.

Untuk menentukan predikat efektivitas proses dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur, skor-skor hasil penelitian tersebut disusun ke dalam 4 (empat) kelas sesuai jawaban kuesioner dengan

$$\text{Persentase} = \frac{\text{Skor tertinggi} - \text{Skor terendah}}{5}$$

- f) Menginterpretasi efektivitas dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur

Setelah interval kelas di dapat, selanjutnya membuat tabel distribusi frekuensi untuk efektivitas proses dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur (Rohmi, 2018):

Tabel 3
Distribusi Frekuensi Untuk Efektivitas Proses pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur

Prediket	Kriteria (%)
Sangat Tidak Efektif	0 – 20
Tidak Efektif	21 – 40
Cukup Efektif	41 - 60
Efektif	61 – 80
Sangat Efektif	81 - 100

- g) Selanjutnya skoring kusioner kemudian persentase yang diperoleh dibandingkan dengan persentase ideal yang telah ditetapkan dalam pedoman umum pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan

infrastruktur Apabila persentase yang didapatkan lebih kecil dibandingkan dengan kriteria yang ditentukan, maka pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur dinyatakan tidak efektif dari aspek output (Rohmi, 2018).

HASIL PENELITIAN

Terdapat 90 orang responden dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi respodennya adalah aparatur desa dan masyarakat desa yang tersebar di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir. Hasil penelitian ini didapat dari angket dan pengamatan lapangan. Data yang dimaksud meliputi karekteristik responden , pernyataan serta jawaban pertanyaan kepada responden mengenai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur dan ekonomi

Pengalokasian Dana Desa di Desa Pondok Kresek

Dana desa yang diperoleh dan dialokasikan berbagai kegiatan di Desa Pondok Kresek, selain itu berikut ini terlebih dahulu dapat dilihat perkembangan realisasi dan target pengalokasian dana desa terutama dalam infrastruktur desa. berikut ini dapat dilihat pengalokasian dana desa di Pondok Kresek. Adapun distribusi dana desa yang dimanfaatkan untuk pembangunan desa terdiri dari Pembangunan sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan.

Tabel 4
Pengalokasian Dana Desa Bidang
Infrastruktur di Desa Pondok
Kresek Kecamatan Tanjung
Medan

No	Keterangan	2018		2019		2020	
		Jumlah Kegiatan	Volume	Jumlah Kegiatan	Volume	Jumlah Kegiatan	Volume
1	Sumur Bor	4	4 Unit	1	1 Unit	1	1 Unit
2	Semenisasi			2	170 M		
3	Sanitasi Air	3	3.385 M	1	1.100		
4	Box Culvert			2	2 Unit		
5	Gedung MDA	1	1 Unit				
6	Pamsimas					1	1 Unit

Sumber : Laporan Pemerintahan Desa Pondok Kresek, 2020

Berdasarkan tabel 4 terlihat jika pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa terdiri dari Pembangunan sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimana pembangunan sumur bor dibangun pada tahun 2018 sebanyak 4 unit, di tahun 2019 1 unit. Selain itu, kegiatan semenisasi dilakukan sebanyak 2 kegiatan di tahun 2019 dengan volume 170 Meter. Dana Desa juga dialokasikan untuk membangun sanitasi air pada tahun 2018 sebanyak 3 kegiatan dengan panjang 3.385 M dan 1 kegiatan di tahun 2019 sepanjang 1.100 M. selanjutnya kegiatan pembangunan boc culvert pada tahun 2019 sebanyak 2 unit dan pembangunan gedung MDA di tahun 2018 sebanyak 1 unit gedung.

Kegiatan yang dilakukan ini tentunya mengalokasikan dana desa

yang terlebih dahulu telah dilakukan penganggaran perencanaan target dana yang digunakan. Berikut ini dapat dilihat target dan realisasi dana desa di Desa Pondok Kresek :

Tabel 5
Target dan Realisasi
Pengalokasian Dana Desa Bidang
Infrastruktur di Desa Pondok
Kresek Kecamatan Tanjung
Medan

No	Keterangan	2018		2019		2020	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Sumur Bor	94.912.000	94.912.000	21.900	21.900	21.900	21.900
2	Semenisasi						
3	Sanitasi Air	203.100.000	203.100.000	128.765.000	128.765.000		
4	Box Culvert			106.557.000	106.557.000		
5	Gedung MDA	127.457.200	127.457.200				
6	Pamsimas					72.635.000	72.635.000

Sumber : Laporan Pemerintahan Desa Pondok Kresek, 2020

Berdasarkan tabel 5 dapat diketahui bahwa seluruh target yang direncanakan dalam pengalokasian dana desa untuk pembangunan infrastruktur desa telah terrealisasi dengan sangat baik, hal tersebut terlihat dari angka target dapat tercapai dalam kegiatan realisasi.

Hasil Analisis Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa

Analisis efektifitas dilakukan bertujuan untuk mengetahui kegiatan pemanfaatan dana desa yang telah dialokasikan telah dilaksanakan dengan efektif atau tidak terutama

untuk kegiatan pembangunan dan perekonomian desa. Untuk mengetahuinya dianalisis menggunakan kuesioner dan skala likert yaitu berdasarkan kesetujuan atau ketidaksetujuan responden terkait kegiatan pemanfaatan dana desa untuk kegiatan pembangunan dan perekonomian di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan.

Untuk lebih jelas berikut ini dapat dilihat efektivitas pemanfaatan dana desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan :

Tabel 6
Efektifitas Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan dan Perekonomian Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan

No	Pernyataan	C (3))	S (4))	S (5))	T (6))	Kesi mpu lan
1	Dana desa melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemanfaatan		4 8	4 2	4 0 5	90,0 0
2	Masyarakat memperoleh sumber pendapatan dari kegiatan pemanfaatan dana desa	4	4 9	3 7	3 9 3	87,3 3
3	Kegiatan pemanfaatan dana desa mendoeong kemudahan kegiatan usaha masyarakat desa	1 5	4 3	3 2	3 7 7	83,7 7
4	Dana desa juga mengembangkan lembaga ekonomi desa	3 1	3 5	2 4	3 5 3	78,4 4
5	Dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan desa	1 0	2 6	5 4	4 0 5	90,0 0
6	Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	1 9	4 3	2 8	3 6 9	82,0 0
7	Pembangunan dan pemeliharaan irigasi/drainase.	1 5	7 1	4 4	3 4 9	77,5 6
8	Pendirian dan pengelolaan Bumdes di desa	6 2	2 2	6 0	3 0 4	67,5 6
9	Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan hasil pertanian.	5 0	3 4	6 6	3 1 6	70,2 2
10	Belanja untuk Bantuan bibit, pupuk dan pakan ternak/ikan.	4 3	3 7	1 0	2 4 4	54,2 2

1	Penggunaan dana desa telah menambah jumlah sarana dan prasarana secara nyata.	1 7	2 9	4 4	3 8 7	86,0 0
1	Penggunaan dana desa menjadi sumber peningkatan sarana dan prasarana desa dari berbagai aspek	3 3	4 5	1 2	3 3 9	75,3 3
1	Kegiatan pemanfaatan dana desa telah menjadi salah satu pendorong kemudahan akses didesa	1 3	4 1	3 6	3 8 3	85,1 1
4	Dana desa telah mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes atau kelompok usaha masyarakat desa	5 2	3 4	4 1	3 1 2	69,3 3
Rata - Rata						78,3 5
Kesimpulan						Efek tif

Sumber: Data Olahan tahun 2021

Berdasarkan tabel 6 dapat diketahui efektifitas pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan dan perekonomian ekonomi desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan, dimana berdasarkan pernyataan yang diberikan untuk dijawab yang terdiri dari 14 pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dimana rata – rata jawabab responden yaitu 78,35 yang mana dalam criteria penilaian efektifitas yaitu kegiatan pemanfaatan dana desa dilakukan secara efektif.

PEMBAHASAN

Pengalokasian Dana Desa Dalam Pembangunan Perekonomian Dan Infrastruktur Desa Di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Desa Pondok Kresek, dimana dana desa yang disalurkan tentunya dapat menunjang peningkatan perekonomian desa selain itu juga

dapat mendorong pembangunan infrastruktur. Desa Pondok Kresek merupakan salah satu desa penerima penyaluran dana desa yang melaksanakan pengalokasian dana desa tentunya mengikuti aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat yang tertuang kedalam undang undang dan peraturan pemerintah serta pereturan menteri sehingga pelaksanaan dapat dilakukan seefektif mungkin.

Sebelum melakukan kegiatan pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa tentunya kegiatan tersebut terlebih dahulu dilakukan perencanaan sehingga dari dana desa yang disalurkan ke masing – masing desa dapat dianggarkan dengan baik sehingga kegiatan yang dilakukan dapat terlaksana dengan efektif.

Desa merupakan kesatuan wilayah otonom dengan diberlakukannya desentralisasi tidak lepas dari cita-cita demokrasi. Seharusnya langkah dalam mengimplemensikan desentralisasi desa dilakukan dengan terstruktur dan desa dalam menyelenggarakan pemerintahan harus mendapatkan fasilitas pendekatan partisipatif dan gagasan dari masyarakat terakomodir dalam sebuah konsep dan model desentralisasi desa (Siburian, 2014).

Dalam sistem pemerintahan saat Peranan desa dalam sistem pemerintahan yang dijalankan saat ini cukup strategis yaitu membantu pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan, kemudian juga dalam hal pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai wujud nyata pemerintah daerah dalam mendukung jalannya otonomi daerah di wilayahnya. Pembagiannya berdasarkan dengan banyaknya

penduduk, seberapa besar wilayahnya, fasilitas yang tersedia dan kemudian dalam mengakses desanya. Penerapan kebijakan tersebut bertujuan sebagai bentuk peningkatan (Siburian, 2014).

Implementasi dana desa terlihat dari efektivitas, efisiensi, kecukupan pemerataan dan responsibilitas. Keefektifitasnya terlihat dari segi kesesuaian target yang dilaksanakan. Keefisienannya terlihat dari bagaimanakah pemerintah desa dapat mengelola anggaran desa sesuai dengan target yang akan dilakukan dalam pembangunan desa. Kemudian kecukupan pemerintah desa pun dapat menyesuaikan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya dengan kebutuhan yang dapat menunjang perubahan baik dari segi infrastruktur ataupun ekonominya, setelah itu baru ditinjau dari segi pemerataannya.

Pengalokasian dana desa untuk pembangunan desa terdiri dari Pembangunan sarana dan prasarana Lingkungan, Pembangunan sarana dan prasarana transportasi, Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, dimana pembangunan sumur bor dibangun pada tahun 2018 sebanyak 4 unit, di tahun 2019 1 unit. Selain itu, kegiatan semenisasi dilakukan sebanyak 2 kegiatan di tahun 2019 dengan volume 170 Meter. Dana Desa juga dialokasikan untuk membangun sanitasi air pada tahun 2018 sebanyak 3 kegiatan dengan panjang 3.385 M dan 1 kegiatan di tahun 2019 sepanjang 1.100 M. selanjutnya kegiatan pembangunan boc culvert pada tahun 2019 sebanyak 2 unit dan pembangunan gedung MDA di tahun 2018 sebanyak 1 unit gedung.

Sehingga pembangunan dibidang infrastruktur terutama dalam mendorong kegiatan pertanian tentunya akan menjadi begitu penting untuk dilakukan. Di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan telah dilakukan pembangunan dibidang perairan terutama yang berhubungan dengan kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat desa.

Dalam kegiatan atau pelaksanaan setiap program yang dilakukan begitu pun dengan kegiatan dana desa di setiap desa tentunya diharapkan dapat dimanfaatkan seefektif mungkin, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan menjelaskan bahwa dsebelum kegiatan dilaksanakan terlebih dahulu dilakukan kegiatan perencanaan program yang akan dilakukan dengan cara mengadakan musrembang desa.

Efektivitas Dana Desa Dalam Pembangunan Perekonomian dan Infrastruktur Desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir

Jika dilihat analisis efektifitas pemanfaatan dana desa dalam bidang pembangunan dan perekonomian ekonomi desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan, dimana berdasarkan pernyataan yang diberikan untuk dijawab yang terdiri dari 14 pernyataan yang berkaitan dengan pemanfaatan dana desa dimana rata – rata jawaban responden yaitu 78,35 yang mana dalam criteria penilaian efektifitas yaitu kegiatan pemanfaatan dana desa dilakukan secara efektif.

Pemanfaatan dana desa diharapkan dapat dilaksanakan 100% yang artinya segala kegiatan yang dilakukan sesuai dengan anggaran dan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan desa. jika dilihat berdasarkan perhitungan yang dilakukan analisis efektifitas berada pada angka 78,35 artinya pemanfaatan telah efektif . meskipun telah dilakukan sesuai ketentuan yang dihadapi akan tetapi pemanfaatan dana desa masih mengalami keterbatasan.

Terutama dalam kegiatan perekonomian desa, hal tersebut terlihat dari pernyataan responden terkait pelaksanaan kegiatan ekonomi yang bersumber dari dana desa. salah satunya yaitu desa belum maksimal dalam mendirikan BUMdes hal tersebut terlihat dari pernyataan responden bahwasanya sebanyak 52 responden atau 57,78% menyatakan cukup setuju dengan pernyataan tersebut, selanjutnya sebanyak 34 responden atau 37,78% menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan sebanyak 4 responden atau 4,44% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut terkait dana desa telah mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh Bumdes atau kelompok usaha masyarakat di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan.

Artinya saat ini dana desa dikembangkan belum memikirkan kegiatan dalam jangka panjang, atau kegiatan pengelolaan kegiatan yang mendatangkan pendapatan bagi desa. sebagaimana diketahui bahwa kegiatan pemanfaatan dana desa masih berfokus kepada pembangunan dan perawatan sarana dan prasarana desa.

Sedangkan, sebaiknya kegiatan dana desa juga dialokasikan untuk kegiatan yang bersifat produktif terutama melibatkan masyarakat desa sesuai dengan keunggulan yang dimiliki desa. sehingga desa akan memiliki potensi untuk bersaing. Seagaimana dimuat dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 bahwasanya Dana Desa sebagai salah satu sumber pendapatan Desa harus mampu dikelola oleh Desa secara berkelanjutan agar penggunaan Dana Desa dapat menghasilkan pendapatan asli Desa. Pengelolaan Dana Desa secara berkelanjutan antara lain Dana Desa diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di Desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan yang berlaku selain itu pengalokasian dana desa dilakukan untuk pembangunan dan perawatan

sarana dan prasarana seperti jalan, irigasi, semenisasi dan drainase di lingkungan Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir.

2. Pembangunan perekonomian dan infrastruktur desa di Desa Pondok Kresek Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir yang bersumber dari pemanfaatan dana desa telah dilakukan secara efektif berada pada angka 78,35 artinya pemanfaatan telah efektif . meskipun telah dilakukan sesuai ketentuan yang dihadapi akan tetapi pemanfaatan dana desa masih mengalami keterbatasan. Adapun keterbatasan dalam perekonomian desa, hal tersebut terlihat dari pernyataan responden terkait pelaksanaan kegiatan ekonomi yang bersumber dari dana desa. salah satunya yaitu desa belum maksimal dalam mendirikan BUMdes.

SARAN

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka dapat dirumuskan saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengalokasian dana desa terutama dalam kegiatan pembangunan infrastruktur sebaiknya melibatkan masyarakat dalam penentuan kegiatan apa yang dilakukan, hal tersebut dilakukan melalui kegiatan musrembang desa dimana masyarakat didorong untuk melaporkan kebutuhan warga disetiap dusun mereka masing – masing dengan begitu maka kegiatan pembangunan yang

dilakukan akan lebih cepat tepat sasaran. Selain itu dalam kegiatan pengalokasian untuk selalu melibatkan masyarakat dengan prinsip swakelola sehingga akan menjadi sumber pendapatan untuk masyarakat yang tergolong pra sejahtera.

2. Sebaiknya dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan pemanfaatan dana desa mencapai 100% artinya sangat efektif, segala hal yang mendorong peningkatan perekonomian sebaiknya diperhatikan terutama terkait dengan badan usaha desa atau BUMDes, selain itu dalam pengembangan BUMDes nantinya menyesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memudahkan masyarakat dalam berbagai hal. Selain itu BUMDes diharapkan sebagai wadah yang dapat mendorong peningkatan daya saing desa untuk dapat menciptakan produk unggulannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edi, S. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Gibson, J. L. (2006). *Organisasi/Perilaku, Struktur, Proses*. Jakarta: Binarupa Aksara.
- Kodoatie, R. (2003). *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rohmi, M. L. (2008). *Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Bantuan Dan Perlindungan Sosial Bagi Masyarakat (Studi Kasus Di Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung)*. Tesis: Universitas Lampung.
- Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lambean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* 6(1).
- Sari, Y. N. (2017). *Efektivitas Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan Khususnya di Kabupaten Langkat*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Sukirno, S. (2015). *Makroekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Umar, H. (2009). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali.
- Widjaja, H.A.W. (2008). *Otonomi Desa: Merupakan otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Zahnd, M. (2006). *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Kanisius.